

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO

Wayan Swarte
wayanart457@gmail.com
Lindrianasari
Tri Joko Prasetyo
Sudrajat
Fitra Darma
Universitas Lampung

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence of the influence of ownership structure and corporate governance on the disclosure of risk management in the banking industry in Indonesia. The measurement of the dependent variable, namely the disclosure of risk management in this study, refers to the circular letter of Bank Indonesia No. 14/35 / DPNP 2012 concerning the Contents of Commercial Bank Annual Reports and Certain Annual Reports Delivered to Bank Indonesia. The sample used in this study is a banking company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The sample is determined based on purposive sampling technique, that is, the sample is chosen based on the availability of information and compliance with the criteria determined in this study, so that a sample of 32 companies with 160 data observations is obtained. Hypothesis testing is done by multiple linear regression. The results showed that management ownership did not have a negative and not significant effect on risk management disclosures, foreign ownership had a positive and not significant effect on risk management disclosures, the size of the audit committee had a positive and not significant effect, subsequently the variable of public ownership and the size of independent commissioners had a positive and significant effect. on risk management disclosures.

Key words: disclosure of risk management; GCG; ownership structure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko industri perbankan di Indonesia. Pengukuran variabel dependen yaitu pengungkapan manajemen risiko dalam penelitian ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No 14/35/DPNP tahun 2012 tentang isi laporan tahunan bank umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sampel ditentukan berdasarkan tehnik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan dengan 160 data obsevasi. Uji pada hipotesis dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, ukuran komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan, selanjutnya variabel kepemilikan publik dan ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Kata kunci: manajemen risiko; GCG; struktur kepemilikan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global menuntut perusahaan perbankan untuk mampu menghadapi persaingan. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antar perbankan, manajemen perusahaan akan berusaha untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan dan risiko yang dihadapi. Pengelolaan manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perbankan. Kewajiban pengungkapan manajemen risiko tercantum pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Peraturan ini didasarkan semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi akan semakin meningkat, dengan adanya peningkatan risiko yang dihadapi oleh perbankan maka perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko perbankan di Indonesia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Huang, 2006) yang berjudul *Bank Disclosure Index: Global Assessment of Bank Disclosure Practice*, penelitian ini dilakukan dengan menghitung komposit indeks dari pengungkapan perbankan di 180 negara sejak tahun 1994. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak begitu memuaskan, dimana posisi Indonesia di Asean masih dibawah Thailand yang berada di posisi (29), Malaysia posisi (44), Singapura posisi (45) dan Philipina posisi (48). Jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara Indonesia hanya lebih mengungguli Kamboja yang berada di posisi (128), Vietnam (135), Brunei Darussalam posisi (169) dan Laos (175).

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik *good corporate governance* oleh perusahaan di Indonesia. Pasalnya, penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia saat ini relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Menurut OJK pencapaian Indonesia masih tertinggal dari Thailand yang

mampu menempatkan 23 Emiten, Filipina 11 Emiten, Singapura 8 Emiten dan Malaysia 6 Emiten, Sedangkan Indonesia hanya terdapat 2 emiten yang masuk kedalam daftar 50 Terbaik dalam prakti *good corporate governance* di ASEAN. Kedua Emiten tersebut ialah Bank Danamon dan Bank CIMB Niaga (Primadhyta, 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zaidirina *et al.*, 2017a) menemukan bahwa bank-bank Indonesia hanya melaporkan item pengungkapan dengan total skor rasio 50%. Bisnis Indonesia percaya bahwa tata kelola perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan nilai pemegang saham (*good news*). Namun, tata kelola perusahaan tidak mencakup nilai-nilai yang berjalan secara sistematis tetapi hanya diterapkan demi tindakan kuratif. Oleh karena itu, penipuan dan pengambilalihan pemegang saham minoritas dan pembayar pajak masih berlanjut dalam praktik (*bad news*).

Perdebatan mengenai pentingnya pelaporan risiko dimulai pada awal tahun 1998 ketika *Institute of Chatered Accountants* di Inggris dan Wales (ICAEW) menerbitkan sebuah makalah diskusi yang berjudul "*Financial Reporting of Risk Statements for a Statements of Business Risk*". ICAEW menyarankan kepada manajemen perusahaan untuk mengungkapkan manajemen risiko dalam laporan tahunan untuk memfasilitasi para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan (Elzahar dan Hussainey, 2012). Runtuhnya beberapa perusahaan Amerika Serikat baik karena kecurangan maupun penipuan pelaporan akuntansi seperti yang di alami oleh Enron dan Worldcom, membuat beberapa perusahaan berinisiatif untuk meningkatkan *good corporate governance* dengan memberikan perhatian terhadap peran dari manajemen risiko (Subramaniam *et al.*, 2009).

Kasus kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap keandalan dan keakuratan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap

tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan tetapi hanya disusun berdasarkan standar dan aturan akuntansi. Hal ini menyebabkan banyak permintaan dari para *stakeholder* agar perusahaan melakukan perluasan pengungkapan dalam laporan keuangan (Gunawan dan Zakiyah, 2017). Di Indonesia, belakangan ini masih menjadi isu baru yaitu mengenai pembobolan 14 Bank BUMN dan Swasta oleh perusahaan pembiayaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance* senilai Rp. 14 T. PT. SNP berhasil memperoleh kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp. 10 T sedangkan sisanya sebesar Rp 4 T adalah akumulasi dari 13 Bank lainnya. Hal ini terjadi karena ketidak hati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit serta tidak berjalannya pengelolaan manajemen risiko dengan baik. Hal ini diduga kuat terjadi karena ada rekayasa dalam pembukuan laporan keuangan yang dilakukan salah satu *the big five* akuntan publik di Indonesia atas laporan keuangan SNP *Finance* (Arnaz, 2018).

Untuk menghindari risiko yang dihadapi perbankan serta untuk melindungi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbankan dituntut untuk mampu mengelola manajemen risiko dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui peraturan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Transparancy adalah salah satu prinsip dari tata kelola perusahaan yang dilakukan perusahaan melalui pengungkapan (*disclosure*). Pengungkapan (*disclosure*) akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan di dalam sistem korporasi. Dengan kata lain kualitas mekanisme tata kelola perusahaan seharusnya

dapat dilihat dari keterbukaan atau transparansi (Fathimiyah *et al.*, 2012)

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas, untuk memberikan pembenaran dan penjelasan mengenai risiko apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran *et al.*, 2009). Artinya semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan, maka pengungkapan risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan semakin luas, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan sebanyak-banyaknya kepada *stakeholder*, agar *stakeholder* dapat mengetahui apa penyebab risiko dan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut serta bagaimana cara perusahaan mengatasi risiko yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh (Kristiono *et al.*, 2014) yang berjudul pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko hasilnya adalah hanya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dan berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan dan Zakiyah, 2017) dengan sampel penelitian perusahaan non keuangan di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Roberto dan Tarigan, 2013), hasil penelitian menunjukkan pengaruh tingkat *leverage* yang signifikan, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan tingkat *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian mengenai pengungkapan manajemen risiko menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemangku

kepentingan dapat mengetahui sejauh mana manajemen perusahaan mampu mengelola risiko yang dihadapi perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko di Industri perbankan di Indonesia. Pengukuran variabel dependen (pengungkapan manajemen risiko) dalam penelitian ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No 14/35/DPNP tahun 2012 tentang isi laporan tahunan bank umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, berbeda dengan pengukuran yang dilakukan penelitian terdahulu, perbedaan pengukuran ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik untuk *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham kreditur, pesaing dan lain-lain. Dalam teori *Stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas, untuk memberikan pembenaran dan penjelasan mengenai risiko apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran *et al.*, 2009). Artinya semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan, maka pengungkapan risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan semakin luas, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan sebanyak-banyaknya kepada *stakeholder*, agar *stakeholder* dapat mengetahui apa penyebab risiko dan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut serta bagaimana cara perusahaan mengatasi risiko yang terjadi.

Signaling Theory

Signaling theory merupakan salah satu teori yang melatar belakangi masalah

asimetri informasi. Teori ini dimanfaatkan manajemen perusahaan untuk memberikan sinyal positif dan sinyal negatif, agar dapat mengurangi asimetri informasi. Manajemen perusahaan memberikan informasi terkait pengungkapan risiko perusahaan melalui sarana laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan telah transparan dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga terhindar dari tindakan kecurangan maupun penipuan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016). Penerapan manajemen risiko dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu sinyal yang diberikan perusahaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Pengungkapan yang lebih luas akan memberikan informasi bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena telah menerapkan prinsip transparansi (Gunawan dan Zakiah, 2017).

Tata Kelola Perusahaan

Menurut (Effendi, 2009:1) tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Pokok-pokok pelaksanaan tata kelola perusahaan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite atau satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, penempatan manajemen risiko, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, rencana strategis bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (Effendi, 2009:84).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Pengungkapan Manajemen risiko

Menurut (Fathimiyah *et al.*, 2012) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan

saham oleh manajemen perusahaan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai seseorang yang mengelola perusahaan sekaligus pemegang saham, manajemen tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan bahkan mengalami kebangkrutan. Keadaan ini akan merugikan baik sebagai manajemen atau sebagai pemegang saham. Sebagai pihak manajemen akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan *return* atau pun dana yang di investasikannya (Prayoga dan Almilia, 2013).

Manajemen bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha yang telah dilakukan dengan melakukan pengungkapan laporan tahunan. Jika semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen pada suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan cenderung lebih giat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan pemegang saham dimana adalah dirinya sendiri yaitu dengan mengungkapkan pengungkapan manajemen risiko dengan lebih luas (Prayoga dan Almilia, 2013). Manajemen sangat berperan dalam menjalankan usaha suatu perusahaan, tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan saja melainkan juga sebagai pemegang saham dimana manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian (Fathimiyah *et al.*, 2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen bertujuan untuk meningkatkan *image* perusahaan. Tentu saja informasi tersebut termasuk risiko-risiko dalam perusahaan namun yang sudah dikelola oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu, besarnya proporsi kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerjanya dalam pengungkapan risiko manajemen. Berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H₁: Kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen risiko

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Maulidra, 2015).

Orang asing kurang berinvestasi pada perusahaan yang terkena masalah pemerintahan dan pada saat yang sama berada di negara-negara dengan pengungkapan yang lebih baik. Perusahaan atau orang asing cenderung akan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan yang baik, sehingga, jika semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat pengungkapan manajemen risiko pun semakin besar (Prayoga dan Almilia, 2013).

Dalam penelitian (Fathimiyah *et al.*, 2012) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusi asing terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga dan Almilia, 2013) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing disuatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan manajemen risiko.

H₂: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.

Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Kepemilikan publik adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar perusahaan

(Fathimiyah *et al.*, 2012). Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) oleh perusahaan. Menurut (Vitalia dan Widyawati, 2016) kepemilikan publik adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum atau pihak luar perusahaan.

Adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar, yang dimaksudkan adalah para pemilik saham publik dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) oleh perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan publik maka akan semakin banyak pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan guna memenuhi kebutuhan para pemilik saham (Prayoga dan Almilialia, 2013). Di lain pihak, ada dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan melebihi biaya pengungkapan informasi tersebut (Fathimiyah *et al.*, 2012).

Penelitian yang menghubungkan kepemilikan publik dan pengungkapan manajemen risiko pernah dilakukan oleh (Fathimiyah *et al.*, 2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan (Roberto dan Tarigan, 2013), (Adiyanto, 2018) dan (Kristiono *et al.*, 2014) mendukung hasil penelitian yang dilakukan (Fathimiyah *et al.*, 2012) hasil penelitian menunjukkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan (Prayoga dan Almilialia, 2013) dan (Vitalia dan Widyawati, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa

kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan manajemen risiko, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris.

Independensi dewan komisaris dapat mencerminkan tingkat transparansi dalam perusahaan atau organisasi. (Desender dan Lafuente, 2009) dalam (Agista dan Mimba, 2017) menjelaskan dengan adanya komisaris independen sebagai media dalam meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agista dan Mimba, 2017) adalah ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management disclosure*. Fungsi pengawasan dewan komisaris yang baik tidak hanya berdasarkan pada kuantitas dari komisaris independen dalam suatu perusahaan, namun lebih ditentukan oleh pengalaman, kompetensi dan komitmen dalam menerapkan dan mengungkapkan *enterprise risk management disclosure*, serta spesialisasi yang sesuai

dengan bidang perusahaan sehingga menunjang dewan komisaris untuk lebih memahami profil risiko sesuai dengan bidang perusahaan. (Fama dan Jensen, 1983) menyatakan bahwa komisaris independen dengan jumlah yang lebih tinggi cenderung dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Sehingga semakin tinggi ukuran komisaris independen maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

H₄: Ukuran Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Komite Audit menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 55/POJK.04/2015 adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Jumlah komite audit dalam perusahaan minimal 3 (tiga) orang, yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan.

Menurut teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan. Hal tersebut diprediksi dengan efektifnya keberadaan dan kinerja komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Semakin besar jumlah anggota komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan risiko (Mubarok dan Rohman, 2013).

Penelitian yang dilakukan (Mubarok dan Rohman, 2013) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada laporan keuangan interim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Elzhar dan Hussainey, 2012) menemukan bahwa ukur-

an komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Temuan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali atas hasil temuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₅: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, hal ini dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 32 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Kriteria pemilihan sampel yaitu: Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa efek hingga tahun 2013-2017, Perusahaan Perbankan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap (*annual report*) periode 2013-2017. Pada penelitian menggunakan 5 (lima) *variable independen* yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan publik, ukuran komisaris audit dan ukuran komite audit.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri yaitu dengan lebih detail dalam pengungkapan manajemen risiko (Almikyala dan Andayani, 2017). Kepemilikan manajemen diukur dengan rasio (jumlah saham yang dimiliki manajemen atau total saham yang beredar).

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum. Semakin tinggi tingkat kepemilikan

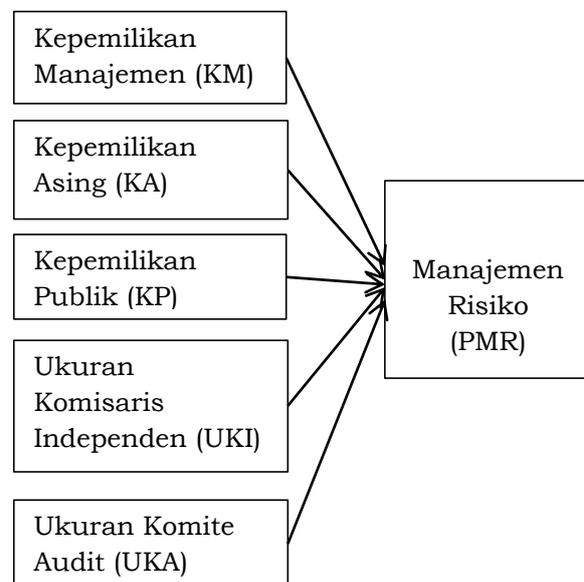
publik akan dapat memberikan banyak informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham (Saputro dan Suryono, 2014). Sedangkan (Vitalia dan Widyawati, 2016) suatu struktur kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Kepemilikan publik diukur dengan rasio (jumlah saham yang dimiliki publik atau total saham beredar).

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Orang asing kurang berinvestasi pada perusahaan yang terkena masalah pemerintahan. Perusahaan atau orang asing cenderung akan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan yang baik. Sehingga, jika semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat pengungkapan manajemen risiko pun semakin besar (Prayoga dan Almilia, 2013). Kepemilikan asing diukur dengan rasio (jumlah saham yang dimiliki asing atau total saham beredar).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (Desender dan Lafuente, 2011) menjelaskan dengan adanya komisaris independen sebagai media dalam meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen. Ukuran komisaris independen diukur dengan melihat jumlah anggota komisaris independen.

Komite Audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan risiko (Mubarok dan Rohman, 2013). Komite audit diukur dengan melihat jumlah komite audit di perusahaan.

Variabel dependen pengungkapan manajemen risiko diukur dengan melihat item yang diungkapkan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No 14/35/DPNP tahun 2012 tentang isi laporan tahunan bank umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia yaitu memberi nilai 1 jika item diungkapkan dan nol jika item tidak diungkapkan. Model penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan metode penelitian meliputi analisis deskriptif, uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji F, uji determinasi R² dan uji t. Adapun rerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

Adapun bentuk model regresi yang digunakan sebagai dasar adalah bentuk fungsi linear berganda yakni:

$$PMR_{it} = \beta_0 + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 KIA_{it} + \beta_3 KP_{it} + \beta_4 UKI_{it} + \beta_5 UKA_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- PMR : Pengungkapan Manajemen risiko
- KM : Kepemilikan Manajemen
- KIA : Kepemilikan Asing
- KP : Kepemilikan public
- UKI : Ukuran komisaris independen
- UKA : Ukuran komite audit
- ϵ_{it} : Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan sampel yang memenuhi kriteria penelitian adalah sebanyak 32 perusahaan dengan 160 observasi. Beberapa kriteria tersebut diantaranya perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia sampai dengan tahun 2017, perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap dari tahun 2013-2017.

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
PMR	160	,0970	,8550	,535938	,21211
KM	160	,000	,282	,01085	,03869
KA	160	,000	,990	,40191	,32909
KP	160	,000	,558	,22967	,16101
UKI	160	2	5	2,89	,847
UKA	160	2	8	3,90	1,150
Valid N	160				

Sumber: Data diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel PMR (pengungkapan manajemen risiko) memiliki nilai terendah 0,0970 dan nilai maksimum 1 yang artinya dari 160 sampel yang diteliti pengungkapan terendah adalah 0,0970 atau 9,7% dan pengungkapan tertinggi adalah 0,8550 atau 85,5%. Sedangkan nilai *mean* adalah 0,535938 atau 53,59%

artinya tingkat pengungkapan manajemen risiko di perbankan sudah baik yaitu 53,59% dengan standard deviasi 0,21211. Rata-rata pengungkapan manajemen risiko ini mendukung penelitian (Zaidirina *et al.*, 2017b) yang menemukan bahwa bank-bank Indonesia hanya melaporkan item pengungkapan dengan total skor rasio 50%.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa risiko yang paling banyak diungkapkan adalah risiko likuiditas dengan nilai *mean* sebesar 0,6812 atau 68,12%, sedangkan pengungkapan risiko terendah adalah pengungkapan risiko pasar hal ini ditunjukkan dengan nilai *mean* sebesar 0,2860 atau 28,60%. Rendahnya pengungkapan risiko pasar dikarenakan perbankan tidak mengungkapkan item perhitungan risiko pasar dengan model internal. Model internal atau *value at risk* merupakan metode pengukuran risiko dengan menggunakan pendekatan statistik. Definisi VaR adalah: "Probabilitas maksimum potensial kerugian yang mungkin timbul dari suatu *outstanding* portofolio dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) tertentu untuk horizon waktu yang tertentu".

Tabel 2
Deskriptive Statistics Pengungkapan Manajemen risiko

Jenis Pengungkapan Risiko	N	Min	Max	Mean
PMR Kredit	160	,03	,90	,5704
PMR Pasar	160	,00	,58	,2860
PMR Operasional	160	,00	1,00	,6766
PMR Likuiditas	160	,00	1,00	,6812
PMR Hukum	160	,00	1,00	,6656
PMR Startegik	160	,00	1,00	,6105
PMR Kepatuhan	160	,00	1,00	,6459
PMR Reputasi	160	,00	1,00	,4895
Valid N (listwise)	160			

Sumber: Data diolah

Pengungkapan manajemen risiko berdasarkan perusahaan diketahui bahwa tingkat pengungkapan manajemen risiko pada posisi pertama terdapat pada Bank Mega dengan jumlah rata-rata pengungka-

pan sebesar 83,9%. Posisi kedua pada Bank BCA dengan rata-rata jumlah pengungkapan sebesar 82,3%. Pada posisi ke-tiga terdapat pada Bank Permata dengan jumlah rata-rata pengungkapan sebesar 81,6% dan diposisi ke-empat terdapat pada Bank BNI sebesar 79%.

Sementara itu rata-rata pengungkapan manajemen risiko terendah terdapat pada Bank of India Indonesia sebesar 10,3%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa Bank Danamon berada pada posisi ke-4 dalam pengungkapan manajemen risiko, sementara itu Bank CIMB Niaga masuk dalam urutan ke-11 dalam pengungkapan manajemen risiko dengan nilai rata-rata 64,2%.

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajemen memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,282 atau 28,2% yang artinya dari seluruh perusahaan yang diteliti, kepemilikan manajemen terendah dalam perusahaan adalah sebesar 0%, sedangkan kepemilikan manajemen tertinggi dalam perusahaan adalah sebesar 28,2% yang dimiliki oleh Bank Capital Tbk. Nilai *mean* sebesar 0,01085 menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan manajemen dalam perusahaan dari 160 sampel adalah sebesar 1,085% dengan standar deviasi sebesar 0,038698. Kepemilikan manajemen terdiri dari kepemilikan oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa kepemilikan manajemen oleh dewan direksi memiliki nilai tertinggi 0,0177 atau 1,77% terdapat pada Bank MNC Capital. Nilai rata-rata dari kepemilikan oleh dewan direksi adalah 0,000654 atau 0,006% artinya rata-rata kepemilikan manajemen oleh dewan direksi di perbankan adalah 0,006%.

Sedangkan kepemilikan manajemen oleh dewan komisaris memiliki nilai tertinggi 28,23% terdapat pada Bank Capital dengan nilai *mean* 0,010186 atau 1,02%, Berdasarkan hasil tersebut diperoleh simpulan bahwa kepemilikan manajemen di perbankan banyak dimiliki oleh dewan komisaris.

Tabel 3
Deskriptive Statistics Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Kepemilikan Manajemen dan Tanpa Kepemilikan Manajemen

	N	Min	Max	Mean
Pengungkapan tanpa kepemilikan manajemen	70	,00	,58	,3262
Pengungkapan dengan kepemilikan manajemen	90	,00	,59	,3224
Valid N (listwise)	70			

Sumber: Data diolah

Pada Tabel 3 diketahui bahwa perusahaan perbankan yang sahamnya dimiliki oleh manajemen, rata-rata tingkat pengungkapan manajemen risiko 0,3224 atau 32,24%, sedangkan perusahaan perbankan yang sahamnya tidak dimiliki oleh manajemen, tingkat pengungkapan manajemen risiko rata-rata 0,3262 atau 32,62%.

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,99 atau 99% yang artinya dari seluruh perusahaan yang diteliti, kepemilikan Asing terendah dalam perusahaan adalah sebesar 0%, sedangkan kepemilikan asing tertinggi dalam perusahaan adalah sebesar 99% yang dimiliki oleh Bank J Trust Indonesia Tbk.

Tabel 4
Deskriptive Statistics Kepemilikan Manajemen oleh Dewan Direksi dan Komisaris, Kepemilikan Asing oleh Badan Usaha dan Individu asing

	N	Min	Max	Mean
Pengungkapan dengan Kepemilikan asing	135	,10	,86	,5336
Pengungkapan tanpa Kepemilikan asing	25	,21	,84	,5485
Valid N (listwise)	25			

Sumber: Data diolah

Nilai *mean* sebesar 0,5336 menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan asing dalam perusahaan perbankan dari 160 sampel adalah sebesar 40,19% dengan standard deviasi sebesar 0,329095. Kepemilikan asing diperbankan terdiri dari kepemilikan oleh badan usaha asing dan perorangan asing. Dari Tabel 4 diketahui bahwa kepemilikan asing melalui badan usaha asing memiliki nilai tertinggi sebesar 0,99 atau 99%, dengan nilai *mean* sebesar 0,400262 atau 40,03% artinya bahwa rata-rata kepemilikan asing melalui badan usaha asing di perbankan sebesar 40,3%. Sedangkan kepemilikan asing melalui perorangan memiliki nilai tertinggi sebesar 0,036 atau 3,6% dan nilai *mean* sebesar 0,000506 atau 0,0051% artinya bahwa kepemilikan asing melalui perorangan asing diperbankan sebesar 0,0051%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepemilikan asing diperbankan melalui badan usaha ini terlihat dari nilai *mean* sebesar 40,3%.

Tabel 5
Deskriptive Statistics Pengungkapan Manajemen Risiko dengan Kepemilikan Asing dan Tanpa Kepemilikan Asing

	N	Min	Max	Mean
Kepemilikan manajerial oleh dewan direksi	160	,0000	,0177	,000654
Kepemilikan manajerial oleh dewan komisaris	160	,0000	,2823	,010186
Kepemilikan asing oleh Badan usaha	160	,0000	,9900	,400262
Kepemilikan asing oleh Perseorangan	160	,0000	,0360	,000506
Valid N (listwise)	160			

Sumber: Data diolah

Pada Tabel 4 diketahui bahwa perusahaan perbankan yang sahamnya dimiliki oleh asing, rata-rata tingkat pengungkapan manajemen risiko 0,5336 atau 53,6%, sedangkan perusahaan perbankan yang sahamnya tidak dimiliki oleh asing, tingkat pengungkapan manajemen risiko rata-rata

0,5485 atau 54,85%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing tidak menentukan tinggi rendahnya tingkat pengungkapan manajemen risiko.

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,558 atau 55,8% yang artinya dari seluruh perusahaan yang diteliti, kepemilikan publik terendah dalam perusahaan adalah sebesar 0%, sedangkan kepemilikan publik tertinggi dalam perusahaan adalah sebesar 55,8% yang dimiliki oleh Bank Artha Graha International. Tbk. Nilai *mean* sebesar 0,22967 menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan publik dalam perusahaan dari 160 sampel adalah sebesar 22,97% dengan standard deviasi sebesar 0,161018.

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel ukuran komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 yang artinya dari seluruh perusahaan yang diteliti, ukuran komisaris independen terendah dalam perusahaan sebanyak 2 orang, sedangkan ukuran komisaris independen tertinggi dalam perusahaan sebanyak 5 orang terdapat pada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank of India Indonesia dan Bank Nusantara Prahayangan. Nilai *mean* sebesar 2,89 menunjukkan bahwa rata-rata komisaris independen dalam perusahaan dari 160 sampel adalah sebanyak 2-3 orang standard deviasi sebesar 0,096278.

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 8 yang artinya dari seluruh perusahaan yang diteliti, ukuran komite audit terendah dalam perusahaan adalah sebesar 2, sedangkan ukuran komite audit tertinggi dalam perusahaan adalah sebesar 8 yang dimiliki oleh Bank BRI. Nilai *mean* sebesar 3,90 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah komite audit dalam perusahaan dari 160 sampel adalah sebanyak 3-4 orang dengan standard deviasi sebesar 1,150.

Uji asumsi klasik

Nilai *Asymp Sig.(2-tailed)* 0,027 yang menunjukkan bahwa *Asymp Sig.(2-tailed)* $0,027 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan data tidak terdistribusi secara normal. Namun hasil data tersebut tetap dapat digunakan karena jumlah data dalam penelitian lebih dari 100 data sehingga asumsi normalitas bukan sesuatu yang penting untuk data yang lebih dari 100, data tetap diasumsikan normal (Gujarati, 2004). Hasil perhitungan multikolinieritas diperoleh nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) yang menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF >10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Selain itu, untuk uji autokorelasi, diperoleh hasil durbin watson senilai DL 1,6906 dan du 1,7930.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan publik dan ukuran komisaris independen, memiliki nilai signifikan $> 0,05$ (0,768; 0,645; 0,694; 0,943; $0,429 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan data terhindar dari heteroskedastisitas.

Uji Determinasi R²

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,107 atau 10,7% yang berarti bahwa variabel independen kepemilikan manajemen, kepemilikan asing dan kepemilikan publik, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit dapat menjelaskan variabel dependen (pengungkapan manajemen risiko) sebesar 10,7 % dan sisanya 89,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan oleh penelitian ini.

Tabel 6
Ringkasan Hasil Uji R²

Mo del	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,368 ^a	,135	,107	,2003964	,537

Sumber: Data diolah

Uji F / Kelayakan Model

Dari Tabel 7 diperoleh F hitung sebesar 4,827 dengan Probabilitas 0,000, karena probabilitas lebih kecil dari pada 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan manajemen risiko atau dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan publik, ukuran komisaris independen dan ukuran komite audit, secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Tabel 7
Ringkasan Hasil Uji F / Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,969	5	,194	4,827	,000 ^b
Residual	6,184	154	,040		
Total	7,154	159			

Sumber: Data diolah

Uji t

Informasi yang ditampilkan pada Tabel 8 adalah persamaan regresi berganda antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut ini:

$$RMD_{it} = \beta_0 0,291 + \beta_1 (-0,811) KM + \beta_2(0,15) KA + \beta_3 (0,403) KP + \beta_4 (0,053) UKI + \beta_5 (0,001) UKA + E_{it}$$

Penjelasan dari persamaan regresi berganda tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 0,291 menunjukkan bahwa apabila kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan publik, ukuran komisaris independen dan ukuran komite audit diasumsikan tetap atau sama dengan 0, maka pengungkapan manajemen risiko adalah 0,291.
2. Koefisien kepemilikan manajemen -0,811 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kepemilikan manajerial menyebabkan Pengungkapan manajemen risiko menurun sebesar 0,811 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
3. Koefisien kepemilikan asing sebesar 0,015 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu

satuan variabel kepemilikan asing menyebabkan pengungkapan manajemen risiko meningkat sebesar 0,015 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

4. Koefisien kepemilikan publik sebesar 0,403 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kepemilikan publik menyebabkan pengungkapan manajemen risiko meningkat sebesar 0,403 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
5. Koefisien ukuran komisaris independen sebesar 0,053 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel ukuran komisaris independen menyebabkan pengungkapan manajemen risiko meningkat sebesar 0,053 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
6. Koefisien ukuran komite audit sebesar 0,001 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel ukuran komite audit menyebabkan pengungkapan manajemen risiko meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Tabel 8
Hasil Pengujian Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	,291	,073	3,998	,000
KM	-,811	,432	-1,876	,063
1 KA	,015	,060	,242	,809
KP	,403	,121	3,346	,001
UKI	,053	,023	2,290	,023
UKA	,001	,016	,034	,973

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian variabel kepemilikan manajemen berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa Sig. 0,063 > α (0,05) dengan nilai koefisien -0,811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, artinya semakin tinggi kepemilikan manajemen maka tingkat pengungkapan manajemen

risiko akan menurun, dari hasil proses pengamatan atas sampel menunjukkan bahwa, perbankan yang sahamnya dimiliki oleh manajemen rata-rata pengungkapan manajemen risiko menurun dibandingkan dengan perbankan yang sahamnya tidak dimiliki oleh manajemen. Selain itu, hal ini disebabkan karena saham perusahaan perbankan banyak dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan atau investor sehingga manajemen dituntut untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Manajemen yang memegang saham perusahaan menginginkan perusahaan yang dikelola mengalami kenaikan jumlah investasi baik dari publik maupun asing, sehingga pengungkapan informasi manajemen risiko dianggap perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor sehingga investasi yang diterima dari investor akan bertambah seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor kepada perusahaan.

Manajemen yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengelola perusahaan serta pemegang saham dalam penelitian ini tidak memberikan dampak terhadap pengungkapan manajemen risiko. Menurut (Kristiono *et al.*, 2014) hal ini diduga disebabkan rendahnya bahkan banyak perusahaan perbankan yang sahamnya tidak dimiliki manajemen. Ini terlihat dari Tabel 3 yang menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan manajemen di perusahaan perbankan di Indonesia sebesar 1,085%.

Semakin tinggi kepemilikan manajemen suatu perusahaan menyebabkan semakin besar tanggung jawab manajemen dalam mengambil keputusan dan risiko pun menjadi semakin tinggi (Fathimiyah *et al.*, 2012). Manajemen juga akan memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan dari pengungkapan tersebut, karena mereka telah mengetahui informasi tersebut maka dirasa tidak perlu untuk diungkapkan kembali dalam laporan tahunan (Prayoga dan Almielia, 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fathimiyah *et al.*, 2012),

Tabel 9
Perbankan yang tidak dimiliki manajemen

	BABP	BCIC	BKSW	BNBA	BNII	BNLI	MCOR	MEGA	NOBU	PNBN
PMR	0,6450	0,5870	0,2484	0,4680	0,4776	0,8164	0,5450	0,8390	0,2196	0,5874
KM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data diolah

(Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016) dan (Kristiono *et al.*, 2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Hasil pengujian variabel kepemilikan asing menunjukkan Sig. 0,809 > α (0,05) dengan nilai koefisien 0,015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Tingkat kepemilikan asing yang tinggi tidak menjadi satu-satunya faktor penentu besar kecilnya tingkat pengungkapan manajemen risiko. Hal ini terlihat dari Tabel 4 yang menunjukkan bahwa perbankan yang sahamnya tidak dimiliki asing rata-rata tingkat pengungkapan manajemen risiko lebih besar dari perusahaan perbankan yang sahamnya dimiliki oleh asing.

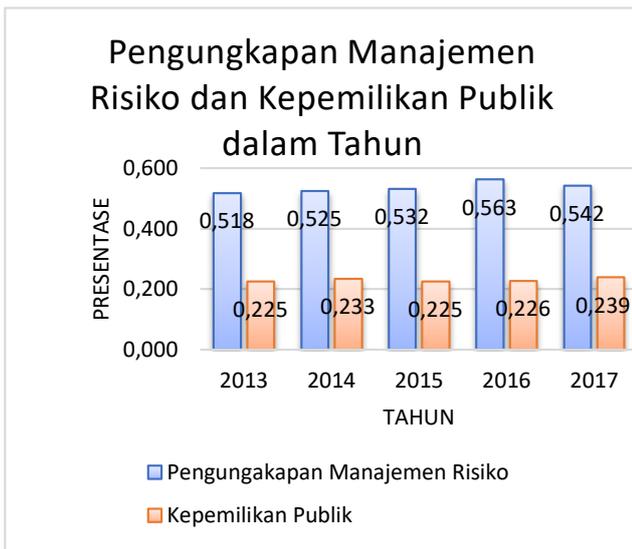
Bank Mutiara merupakan bank yang di ambil alih oleh Bank J-Trust perusahaan perbankan asal Jepang. Pengungkapan manajemen risiko Bank J-Trust menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir, hal ini diduga karena Bank J-trust yang sahamnya mayoritas dimiliki asing ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap perbankan tersebut dengan memberikan pengungkapan yang lebih luas terhadap risiko-risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu pengungkapan manajemen risiko bertujuan untuk menarik minat investor asing untuk melakukan investasi, untuk meningkatkan investasi asing tersebut dilakukan dengan mengungkapkan manajemen risiko secara luas dan lengkap. Hal ini dikarenakan investor asing lebih tertarik melakukan investasi diperusahaan perbankan yang memberikan informasi peng-

ungkapan manajemen risiko dengan lengkap, informasi inilah yang dijadikan landasan oleh investor asing untuk melakukan investasi. Semakin banyak informasi yang diberikan maka semakin besar minat investor asing untuk berinvestasi karena kemungkinan risiko yang akan dihadapi telah diketahui oleh investor asing. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan (Bokpin dan Isshaq, 2009) orang asing kurang berinvestasi dalam perusahaan yang terkena masalah pemerintahan dan pada saat yang sama berada dinegara-negara dengan pengungkapan yang lebih baik.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fathimiyah *et al.*, 2012) dan (Saputro dan Suryono, 2014) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga dan Almilia, 2013) yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, hal ini dikarenakan kepemilikan asing menjadikan pihak manajemen lebih meningkatkan mutu kinerjanya karena pihak asing mempunyai standar yang tinggi sehingga semakin tinggi kepemilikan asing yang dimiliki perusahaan, mereka akan menunjukkan bagaimana cara-cara yang telah ditempuh untuk menanggulangi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan.

Hasil pengujian variabel kepemilikan publik berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa Sig. 0,001 < α (0,05) dengan nilai koefisien 0,403. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan mana-

jemen risiko. Artinya semakin tinggi kepemilikan publik disuatu perusahaan maka pengungkapan manajemen risiko akan meningkat. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin banyak pula detail-detail butir informasi yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin luas (Fathimiyah *et al.*, 2012).



Gambar 2
Grafik pengungkapan manajemen risiko dan Kepemilikan publik dalam tahun

Pada Gambar 2 terlihat bahwa semakin tinggi kepemilikan publik maka pengungkapan manajemen risiko cenderung meningkat. Kepemilikan publik dalam 5 tahun terakhir pada perusahaan perbankan rata-rata mengalami peningkatan dari 22,5% pada tahun 2013 meningkat menjadi 23,9% pada tahun 2017, kenaikan kepemilikan publik diikuti dengan peningkatan pengungkapan manajemen risiko dimana pada tahun 2013 pengungkapan manajemen risiko sebesar 51,8% meningkat menjadi 54,2% pada tahun 2017.

Informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan bertujuan untuk keberlangsungan perusahaan dan mempertahankan investor yang telah berinvestasi.

Semakin besar pengungkapan manajemen risiko akan menarik minat investor domestik untuk melakukan investasi. Perusahaan mengharapkan pertumbuhan investasi yang tinggi dari investor publik dengan melakukan pengungkapan manajemen risiko secara lengkap, dengan pengungkapan yang luas tentu saja investor publik dapat mengetahui kinerja dan keadaan keuangan perusahaan perbankan, sehingga akan meningkatkan minat untuk melakukan investasi atau akan meningkatkan investasinya pada suatu perbankan. Di lain pihak, ada dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan melebihi biaya pengungkapan informasi tersebut (Saputro dan Suryono, 2014).

Penelitian ini mendukung penelitian (Prayoga dan Almilia, 2013) yang menyatakan ada pengaruh antara kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko, namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fathimiyah *et al.*, 2012) dan (Saputro dan Suryono, 2014) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Hasil pengujian variabel ukuran komisaris independen berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa $\text{Sig. } 0,023 < \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien 0,053. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Artinya semakin besar ukuran komisaris independen maka tingkat pengungkapan manajemen risiko akan semakin luas. Jumlah komisaris independen dari perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini rata-rata 57% dari jumlah dewan komisaris, dengan jumlah komisaris independen terendah 2 orang dimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/

2015 mewajibkan jumlah komisaris independen minimal 1 orang dari seluruh anggota dewan komisaris. Rata-rata jumlah dewan komisaris di perusahaan perbankan sebanyak 5 orang, 57% diantaranya adalah dewan komisaris independen, artinya dari 5 orang anggota dewan komisaris, 3 orang diantaranya menjadi dewan komisaris independen. Sehingga dominasi komisaris independen diduga mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya dalam pengungkapan manajemen risiko. (Safitri dan Meiranto, 2013) mengungkapkan komisaris independen dengan jumlah yang lebih tinggi cenderung dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Sementara itu teori keagenan menjelaskan semakin banyak jumlah anggota komisaris yang independen, maka semakin tinggi kualitas pengawasan terhadap direktur eksekutif.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agista dan Mimba, 2017), (Saufanny dan Khomsatun, 2017) yang menyatakan bahwa ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Kencana dan Lastanti, 2018) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara ukuran komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Hasil pengujian variabel ukuran komite audit berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa $\text{Sig. } 0,973 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Jumlah komite audit yang besar tidak menjamin keefektifan tugas dari komite audit. Hal ini dikarenakan efektifitas pengawasan oleh komite audit lebih dipengaruhi dari kompetensi dari masing-masing anggota komite audit daripada kuantitas komite audit yang ada.

Adanya komite pemantau risiko yang terpisah dengan komite audit yang wajib dibentuk perbankan sesuai dengan Surat

Edaran Bank Indonesia No 15/DPNP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank umum yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris terkait dengan penerapan dan pengawan manajemen risiko diduga menjadi penyebab ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, karena dengan adanya komite pemantau risiko diduga peran dari komite audit akan berkurang dan terfokus pada mengawasi aktifitas, pembuatan serta pengauditan laporan keuangan.

(Subramaniam *et al.*, 2009) menyatakan memiliki komite pemantau risiko yang terpisah dan berbeda akan memungkinkan anggota komite untuk sepenuhnya fokus pada berbagai proses dan laporan risiko, dan demikian komite audit akan memberikan kualitas pemantauan internal yang lebih baik daripada ketika memiliki komite gabungan. Pendapat ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agista dan Mimba, (2017) menunjukkan bahwa komite pemantau risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saufanny dan Khomsatun, 2017) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara ukuran komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Kencana dan Lastanti, 2018) dan (Elzhar dan Hussainey, 2012) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin tinggi saham yang dimiliki oleh manajemen, maka pengungkapan manajemen risiko juga akan

menurun. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran komisaris indepen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen, maka pengungkapan manajemen risiko juga akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan jumlah komisaris indepen yang tinggi akan meningkatkan peran pengawasan kepada direksi. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Meningkatnya kepemilikan publik pada perusahaan, maka akan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan, sehingga manajemen perusahaan dituntut untuk mampu menyediakan informasi tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko diperbankan mengimplikasikan bahwa perbankan menginginkan aliran investasi asing yang masuk, sehingga dengan pengungkapan manajemen risiko diharapkan akan menarik minat investor asing. Terakhir penelitian ini menemukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, Hal ini menunjukkan bahwa peran komite audit diperbankan berkurang karena adanya komite pemantau risiko yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris terkait dengan penerapan dan pengawan manajemen risiko.

Perbankan sebagai perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi dituntut untuk mampu mengelola risiko yang dihadapi. Pengelolaan manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perbankan. Namun praktek pengelolaan manajemen risiko diperbankan masih rendah belum sepenuhnya dipatuhi oleh perbankan. Sebaiknya pemerintah selaku

regulator lebih memberikan pengawasan kepada perbankan agar pengelolaan risiko dapat di implementasikan sepenuhnya oleh perbankan.

Saran

Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini dikarenakan sampel yang digunakan hanya perusahaan perbankan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel yang digunakan, misalnya dengan menggunakan perusahaan non keuangan seperti perusahaan manufaktur, property dan lain-lain agar dapat memberikan daya uji empiris yang lebih baik lagi. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode pengamatan serta mempertimbangkan untuk menggunakan atau menambahkan variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti komite pemantau risiko, efektivitas komisaris independen dan lain-lain, agar dapat menjelaskan kaitanya dengan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, H. B. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan pada Industri Perbankan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6: 46-57.
- Agista, G. G. dan N. P. S. H. Mimba. 2017. Pengaruh Corporate Governance Structure dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 20.1(2017): 438-466. (Corporate Governance Structure), 438-466. Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/28368>
- Almikyala dan Andayani. 2017. Struktur Kepemilikan, Struktur Pengelolaan Terhadap Nilai Perusahaan: Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6: 1388-1416.

- Amran, A., A. M. R. Bin, dan B. C. H. M. Hassan. 2009. Risk reporting: An exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal* 24(1): 39–57. <https://doi.org/10.1108/02686900910919893>
- Arnaz, F. 2018. Kasus SNP Finance, Bank Mandiri Bantah Tidak Hati-hati. <http://www.beritasatu.com/nasional/512845-kasus-snp-finance-bank-mandiri-bantah-tidak-hatihatihati.html>. Diakses Diakses Tanggal 10 November 2018.
- Bokpin, G. A. dan Z. Isshaq. 2009. Corporate Governance, Disclosure and Foreign Share Ownership on the Ghana Stock Exchange. *Managerial Auditing Journal* 24(7): 688–703.
- Desender, K. A. dan E. Lafuente. 2009. The Influence of Board Composition, Audit Fees and Ownership Concentration on Enterprise Risk Management. *SSRN Electronic Journal*, 12(January 2009). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1495856>
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Elzahar, H. dan K. Hussainey. 2012. Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim. *The Journal of Risk Finance*: 1–22.
- Fama, E. dan M. C. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics* 26: 301–326.
- Fathimiyah, V., R. Zulfikar, dan F. Fitriyani. 2012. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Risk Management Disclosure (Studi Survei Industri Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*: 1–26.
- Gujarati, D. N. 2004. *Basic Econometrics*. 4th Edition. The McGraw–Hill Companies.
- Gunawan, B. dan Y. N. Zakiyah. 2017. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap Risk Management Disclosure. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 9(1): 1–18.
- Huang, R. 2006. Bank Disclosure Index Global Assessment of Bank Disclosure Practices Bank Disclosure Index. Huang, Rocco, Bank Disclosure Index: Global Assessment of Bank Disclosure Practices (June 26, 2006). Available at <https://ssrn.com/abstract=1425915> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1425915>.
- Kencana, A. dan H. S. Lastanti. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 20(1): 21–32. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i1.404>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kristiono, Zulbahridar, dan Al Azhar. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Risk Management Disclosure pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. *JOM FEKON* 1(2): 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Maulidra, H. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI 2010-2012). *Jurnal Akuntansi* 3(1): 1–30.
- Mubarok, M. A. dan A. Rohman. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Dalam Laporan Keuangan Interim. *Diponegoro Journal of Accounting* 2: 1–15. Diambil dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Prayoga, E. B. dan L. S. Almilia. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4(1).
- Roberto dan M. U. Tarigan. 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Publik, Tingkat Leverage dan Tingkat Profitabilitas terhadap Risk Management Disclosure (pada Perusahaan

- Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 13(2): 907–928.
- Safitri, A. K. dan W. Meiranto. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Risk Management Committee. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4): 1–12.
- Primadhyta, S. 2017. OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180925191223-78-333175/kasus-snp-finance-bank-mandiri-pidanakan-deloitte-indonesia>. Diakses Tanggal 10 November 2018.
- Saputro, C. D. dan B. Suryono, B. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 2(2).
- Saufanny, A. D. dan S. Khomsatun. 2017. Corporate Governance Dan Pengungkapan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 5(April): 47–62.
- Subramaniam, N., L. Mcmanus, dan J. Zhang. 2009. Corporate governance, firm characteristics and risk management committee formation in Australian companies. *Managerial Auditing Journal* 24(4): 316–339. <https://doi.org/10.1108/02686900910948170>
- Sulistyaningsih, S. dan B. Gunawan. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risk Management Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1). <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1973>
- Vitalia, A. dan D. Widyawati,. 2016a. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Properti Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1): 1–21. <https://doi.org/10.1002/cncr.26447>
- Vitalia, A. dan D. Widyawati. 2016b. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Properti Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5: 1–21.
- Zaidirina, Lindrianasari, dan S. Bangsawan. 2017a. Implementation of corporate governance and mandatory disclosure in the Indonesian banking sector: good news or bad news. *International Journal Monetary Economics and Finance* 10: 281–294.
- Zaidirina, Lindrianasari, dan Bangsawan, S. 2017b. Implementation of corporate governance and mandatory disclosure in the Indonesian banking sector: Good news or bad news. *International Journal of Monetary Economics and Finance* 10(3–4): 281–294. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2017.087474>